

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus mengalahkannya pembangunan di segala bidang dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari beberapa sumber yang salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak.

Sekarang pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling diandalkan. Hingga saat ini penerimaan negara dalam sektor perpajakan mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Kontribusi penerimaan pajak diharapkan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang diinginkan pemerintah. Usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 dan menjadi sumber penerimaan utama negara, baik untuk penerimaan oleh pemerintah daerah. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Lajene University of Sitala Syarif Maslim Riau

masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagaimana aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu sumber pendapatan berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagaimana badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang terdiri dari:

1. Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan jenis pajak daerah diatas, yang menjadi salah satu pembahasan saya untuk penelitian adalah Mekanisme Pemecahan Lahan dan Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (**PBB-P2**) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan. Dimana PBB-P2 sangat potensial

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2  
DISPENDA Kabupaten Pelalawan**

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2013	Rp 4,328,184,753	Rp 1,561,990,241	36,09
2	2014	Rp 5,955,937,766	Rp 2,455,125,758	41,22
3	2015	Rp 6,786,184,482	Rp 3,656,103,234	53,87

Sumber: Kantor Dispenda Kabupaten Pelalawan 2015

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa pendapatan dari sektor PBB-P2 sangat lah buruk, dimana target dan realisasi pertahun meningkat tapi peningkatan pendapatan tersebut tidak lebih dari 60 %, ini membuktikan bahwa pendapatan dari sektor PBB-P2 kurang maksimal. Jadi untuk memecahkan rumusan tersebut petugas yang berwenang harus lebih extra bekerja untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pelalawan harus lebih memperhatikan lagi pendapatan PBB-P2, terutama di sektor pemecahan lahan PBB-P2, jika kita menelusuri lebih dalam pemecahan lahan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan mungkin kita merasa merugi karena banyaknya masyarakat yang melakukan pemecahan lahan tapi dalam realisasi pembayaran hanya beberapa masyarakat yang melakukan pembayaran PBB-P2 tersebut, ini merupakan gambaran bahwa kinerja dan sosialisasinya masih kurang maksimal yang dilakukan oleh DISPENDA Kabupaten Pelalawan. Untuk lebih jelasnya dari hasil pengamatan yang dilakukandi DISPENDA Kabupaten Pelalawan bisa kita lihat table berikut ini :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.II

**Daftar Wajib Pada Pemecahan Lahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Tahun 2010-2015**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar	%
2010	101	44	43.56%
2011	101	62	61.38%
2012	101	88	87.12%
2013	171	98	57.30%
2014	325	240	73.84%
2015	451	347	76.94%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Pelalawan dari tahun 2010 hingga tahun 2015 meningkat, namun untuk wajib pajak yang membayar belum sesuai dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Contohnya saja tahun 2014 ke tahun 2015 hanya mengalami kenaikan sedikit untuk wajib pajak yang membayarnya.

Banyaknya masyarakat melakukan pemecahan lahan, dari berbagai kepentingan, pemecahan lahan bisa dari wajib pajak PBB-P2 yang ingin memecahkan lahan mereka atau membagi lahan kepada saudara mereka, dengan dua nama yang berbeda sehingga mereka membayar pajak PBB-P2 pajak berdasarkan nama pemiliknya, tapi kebanyakan masyarakat kabupaten pelalawan masih merasa kesulitan terhadap hal tersebut, mereka masih perlu sosialisasi yang mendalam agar mereka dapat memahami tentang mekanisme pemecahan lahan dan

mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2).

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemecahan lahan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan ?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat di capai solusi atau masalah tersebut yang dihadapi saat ini.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemecahan lahan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### A. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan perkembangan pemikiran dalam ilmu perpajakan pada umumnya.
- b. Untuk mempelajari penerapan mekanisme pemecahan lahan dan mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2)

##### B. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan pemikiran bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.
- b. Dapat memberitahukan tentang pelaksanaan perhitungan dan pemugutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

#### 1.5 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di ambil oleh penulis dalam penelitian ini bertempat di Pangkalan Kerinci atau Kabupaten Pelalawan yaitu di Dinas Pendapatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Kabupaten Pelalawan yang beralamat Jl. Pamong Praja Komplek Perkatoran Bhakti Praza, Pangkalan Kerinci.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis selama 3 bulan yang terhitung sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai 18 Maret 2016.

C. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Dalam hal ini penulis memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian yaitu berupa penjelasan dan keterangan dari para pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan yang memiliki informasi langsung dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Penulis memperoleh data sekunder dari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, makalah, bahan-bahan dari internet, brosur-brosur dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data secara langsung kelapangan untuk meneliti, mengamati dan menyimpulkan hal – hal yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data ini secara langsung di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

## b. Wawancara

Yaitu melakukan wawancara langsung dengan pegawai/petugas pajak untuk mendapatkan data dan informasi yang di bermanfaat bagi penyusunan tugas akhir.

## c. Metode Pustaka

Yaitu studi yang merupakan penilaian atas kesimpulan atau pendapatan baru yang memperkuat uraian atas pengutipan data. Buku-buku yang menjadi referensi merupakan buku-buku yang berkaitan dengan perpajakan secara umum dan buku-buku berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

## E. Analisis Data

Setelah data-data yang dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut :

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, dan uraian tugas Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

### **BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan teoritis dari masalah penelitian antara lain pengertian pajak, , pengertian pajak daerah,pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2).

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan bagi penulisan ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**